KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Angket KPK: DPR minta pencegahan dioptimalkan
Tanggal : Kamis, 08 Februari 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

ANGKET KPK

DPR Minta Pencegahan Dioptimalkan

JAKARTA, KOMPAS — Enam fraksi yang masuk dalam Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menyetujui laporan hasil kerja panitia untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR. Salah satu pandangan yang ditekankan sejumlah fraksi di DPR adalah agar KPK dapat lebih mengoptimalkan fungsi pencegahan korupsi.

Persetujuan keenam fraksi dari 10 fraksi di DPR disampaikan dalam rapat panitia angket dengan agenda pengambilan keputusan tingkat I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2). Fraksi dimaksud adalah fraksi pendukung hak angket, yang sejak panitia bekerja awal Juni 2017 telah masuk dalam panitia, yaitu PDI-P, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasdem, dan Hanura.

Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa seusai rapat tertutup mengatakan, keenam fraksi melihat, selama ini kerja KPK hanya menonjol di fungsi penindakan. Pencegahan yang juga jadi tugas KPK belum optimal.

Oleh karena itu, fraksi-fraksi mendorong KPK agar lebih mengintensifkan langkah-langkah pencegahan korupsi. Untuk mendukung KPK lebih optimal menjalankan fungsi pencegahan, semua fraksi menyepakati anggaran untuk KPK ditingkatkan, khususnya untuk pencegahan.

"Agar pencegahan korupsi, misal dalam bentuk kampanye atau sosialisasi, bisa sistemik dan masif dijalankan KPK. Dengan begitu, bisa tercipta budaya malu korupsi," kata Agun.

Tak mungkin sendiri

Selain pendidikan ke masyarakat, dukungan anggaran diharapkan bisa mendorong KPK melahirkan sistem antikorupsi di seluruh lembaga pemerintahan. Dengan demikian, korupsi yang sering dilakukan penyelenggara negara bisa dicegah. Agar tujuan tercapai, KPK didorong menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan lembaga-lembaga pemerintah. Sebaliknya, lembaga-lembaga itu pun hendaknya juga membantu KPK. "Tidak mungkin KPK kerja sendiri," ujarnya.

Penguatan KPK dalam bentuk peningkatan anggaran disebut Agun hanya satu di antara banyak hal yang ditekankan fraksi-fraksi guna penguatan KPK. Hal lainnya adalah mendorong KPK lebih transparan dan terukur, menjalin hubungan yang lebih baik dengan aparat penegak hukum, juga dengan DPR.

Anggota panitia angket dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, menambahkan, fraksinya meminta KPK melakukan perbaikan dengan mengacu pada temuan-temuan panitia. Contohnya, perbaikan tata kelola barang rampasan dan sitaan serta perlindungan saksi dan korban.

Adapun anggota panitia angket dari Fraksi PAN, Daeng Muhammad, mengingatkan KPK agar lebih baik menjalankan kewenangannya. "Jangan ada lagi status tersangka seseorang berlarut-larut tanpa kejelasan. Tindak lanjut dari kasus korupsi jangan berlarut-larut," ujarnya.

Setelah mengambil keputusan, panitia akan mengirimkan laporan ke KPK. Ini untuk memberi ruang KPK merespons materi laporan. "Persoalan KPK merespons atau tidak bagi kita yang penting jangan ada kesan seolah DPR membuat rekomendasi tanpa memberitahukan pihak yang menjadi subyek dan obyek angket, yaitu KPK," tutur Agun.

Sejauh ini, KPK selalu menolak hadir memenuhi panggilan panitia dengan alasan menjadi pihak terkait perkara uji materi Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Mahkamah Konstitusi. Pengujian di MK untuk menilai keabsahan penggunaan hak angket terhadap KPK. (APA)